



**ANALISIS IMPLIKATUR KONVENSIONAL & TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM  
PIDATO PRESIDEN JOKO WIDODO DI HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA**

*(ANALYSIS OF CONVENTIONAL IMPLICATURES & ILLOCUTIONARY ACTS IN  
PRESIDENT JOKO WIDODO'S SPEECH ON WORLD ANTI-CORRUPTION DAY)*

**Nanik Handayani<sup>1</sup> & Wamulianti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Pos-el: [Muliyanti2711@gmail.com](mailto:Muliyanti2711@gmail.com)

Naskah Diterima Tanggal  
14 Juni 2024

Direvisi Akhir Tanggal  
06 Oktober 2024

Disetujui Tanggal  
20 Oktober 2024

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki fokus yang sangat menarik dalam menganalisis implikatur konvensional dan tindak tutur ilokusi dalam pidato Presiden Joko Widodo pada Hari Antikorupsi Sedunia. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis tekstual dan pendekatan teoretis dari konsep-konsep dalam pragmatik dan analisis wacana. Dalam penelitian ini, terdapat penggunaan teori implikatur konvensional oleh Grice dan tindak tutur ilokusi oleh Austin dan Searle. Selain itu, analisis wacana oleh van Dijk dan teori relevansi oleh Sperber dan Wilson juga digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap data yang dianalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 5 kalimat yang mengandung implikatur konvensional. Selain itu, terdapat 4 jenis tindak tutur ilokusi yang terdiri dari 4 kalimat representatif, 3 kalimat direktif, 2 kalimat komisif, dan 1 kalimat deklarasif. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman analisis yang dilakukan dalam memahami pidato Presiden Joko Widodo dalam konteks Hari Antikorupsi Sedunia.

**Kata Kunci:** Implikatur konvensional, Tindak tutur ilokusi, Pidato Presiden

**Abstract**

*This research focuses on analyzing conventional implicature and illocutionary speech acts in President Joko Widodo's speech on International Anti-Corruption Day. A qualitative descriptive approach is used in this study, involving textual analysis and theoretical approaches from concepts in pragmatics and discourse analysis. The research utilizes the theory of conventional implicature by Grice and illocutionary speech acts by Austin and Searle. Additionally, discourse analysis by van Dijk and the relevance theory by Sperber and Wilson are employed to enhance the understanding of the analyzed data. The findings of this research reveal the presence of 5 sentences containing conventional implicature. Furthermore, there are 4 types of illocutionary speech acts consisting of 4 representative sentences, 3 directive sentences, 2 commissive sentences, and 1 declarative sentence. This demonstrates the complexity and depth of the analysis conducted to understand President Joko Widodo's speech in the context of International Anti-Corruption Day.*

**Keywords:** Conventional implicature, Illocutionary speech acts, Presidential speech

## PENDALHULUAN

Pidato merupakan bentuk komunikasi lisan yang sering digunakan oleh pemimpin untuk menyampaikan pesan dan pandangan kepada masyarakat. Dalam konteks peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, pidato Presiden Joko Widodo menjadi sorotan utama karena relevansinya dengan isu korupsi yang menjadi perhatian global. Dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo tidak hanya menyuarakan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi, tetapi juga melalui penggunaan bahasa dan implikatur konvensional serta tindak tutur ilokusi, menggambarkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan.

Pidato sebagai salah satu bentuk komunikasi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan dan mempengaruhi audiens. Di dalam sebuah pidato, khususnya yang disampaikan oleh tokoh penting seperti presiden, penggunaan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan makna-makna yang lebih dalam, yang terkadang tidak tersampaikan secara eksplisit. Dalam konteks ini, kajian tentang implikatur konvensional dan tindak tutur ilokusi menjadi sangat relevan.

Implikatur konvensional merupakan salah satu bentuk implikatur yang maknanya dapat dipahami berdasarkan konvensi atau aturan kebahasaan yang sudah mapan. Implikatur ini tidak memerlukan konteks khusus untuk dipahami, karena sudah menjadi bagian dari makna kata atau ungkapan yang digunakan. Di sisi lain, tindak tutur ilokusi adalah tindakan yang dilakukan melalui ucapan, seperti menjanjikan, memerintah, atau meminta, yang memiliki efek tertentu terhadap audiens. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu pemimpin yang kerap menggunakan gaya komunikasi yang lugas namun sarat makna dalam pidato-pidatonya. Salah satu pidato yang menarik untuk dikaji dari perspektif pragmatik adalah pidato beliau pada Hari Antikorupsi Sedunia. Dalam pidato ini, Presiden Jokowi menyampaikan pesan-pesan penting terkait pemberantasan korupsi, yang tidak hanya berisi informasi, tetapi juga mengandung makna implisit yang dapat dipahami melalui analisis implikatur konvensional dan tindak tutur ilokusi. Dalam pembahasan ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap implikatur konvensional yang terkandung dalam pidato Presiden Joko Widodo serta tindak tutur ilokusi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap struktur bahasa dan makna tersirat dalam pidato tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang upaya pemerintah dalam memerangi korupsi dan pentingnya komunikasi efektif dalam konteks peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Menurut Rohmadi (2004: 40), untuk memahami makna dari tuturan yang disampaikan dengan humor, seseorang dapat menggunakan beberapa konsep seperti implikatur, praanggapan, inferensi, dan refensi. Implikatur adalah salah satu aspek penting dalam pragmatik yang mempelajari makna yang tersirat dalam percakapan antara penutur dan mitra tutur dalam suatu situasi komunikasi. Nadar (2009: 62) menjelaskan bahwa implikatur merujuk pada hal-hal yang tersirat atau diimplikasikan dalam suatu percakapan. Implikatur dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu implikatur konvensional dan implikatur nonkonvensional. Implikatur nonkonvensional mengungkapkan makna secara langsung dari percakapan, sementara implikatur konvensional, seperti yang didefinisikan oleh Leech (1993: 17), merujuk pada makna yang diperoleh langsung dari kata-kata yang digunakan, bukan dari prinsip-prinsip percakapan.

Implikatur konvensional digunakan untuk menyampaikan makna yang tersirat dalam suatu kalimat tanpa harus tergantung pada konteks percakapan tertentu. Brown dan Yule (1996: 78) juga menegaskan bahwa implikatur konvensional tidak selalu muncul dalam setiap percakapan dan tidak bergantung pada konteks spesifik untuk diinterpretasikan. Dengan demikian, pemahaman tentang implikatur konvensional memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana makna tersirat dapat disampaikan dalam komunikasi sehari-hari. Dalam sebuah tulisan atau wacana, makna yang disampaikan memiliki peran penting. Untuk mengidentifikasi fungsi yang terkandung dalam suatu tuturan, dapat dilakukan melalui analisis tindak tutur. Tindak tutur ilokusi, yang sering muncul dalam pidato, dikenal dengan kalimat performatif yang jelas (Chaer dan Agustina dalam Pusparita & Sumadyo, 2020). Menurut Usdiyanto yang mengutip Searle dalam Achsani (2019), tindak ilokusi digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari tindak ilokusi adalah untuk mempertahankan perilaku sopan dan terhormat dari penutur maupun tindak tutur. John Searle, seorang filsuf bahasa dan ilmuwan kognitif, mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi menjadi lima bagian utama yang masing-masing memiliki fungsi komunikatifnya sendiri. Kelima jenis tindak tutur ilokusi tersebut adalah: (1) Asertif: Tindak tutur asertif digunakan untuk menyatakan fakta atau informasi yang dianggap benar oleh penutur. (2) Direktif: Tindak tutur direktif digunakan untuk memberikan instruksi, perintah, atau permintaan kepada mitra tutur. (3) Ekspresif: Tindak tutur ekspresif digunakan untuk menyatakan perasaan, emosi, atau sikap mental penutur terhadap sesuatu. (4) Komisif: Tindak tutur komisif digunakan untuk menyatakan komitmen, janji, atau niat untuk melakukan sesuatu di masa depan. (5) Deklarasi: Tindak tutur deklarasi digunakan untuk menyatakan perubahan status atau keadaan melalui pernyataan itu sendiri.

## LANDASAN TEORI

### **Teori Implikatur Konvensional (Grice)**

Teori implikatur konvensional yang dikemukakan oleh H.P. Grice merupakan konsep dalam pragmatik yang menjelaskan bahwa dalam proses komunikasi, terdapat implikatur atau makna tambahan yang muncul secara tidak langsung dari ujaran yang diucapkan. Grice mengajukan prinsip kerjasama (*principle of cooperation*) yang menyatakan bahwa dalam berkomunikasi, pembicara dan pendengar saling bekerja sama untuk memahami pesan yang disampaikan. Implikatur konvensional dapat timbul dari prinsip keterbukaan, kejujuran, relevansi, dan keterpaduan dalam berkomunikasi.

Teori implikatur konvensional dapat digunakan untuk mengidentifikasi pesan-pesan tersirat atau implisit yang mungkin terkandung dalam ujaran Presiden. Implikatur konvensional membantu untuk memahami maksud yang tersembunyi di balik kata-kata yang digunakan dalam pidato, serta bagaimana pesan-pesan tersebut dapat dipahami oleh pendengar. Dengan menerapkan teori ini, analisis implikatur konvensional dalam pidato Presiden Joko Widodo dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pesan yang disampaikan dan tujuan komunikatif yang ingin dicapai.

### **Tindak Tutur Ilokusi (Austin dan Searle)**

Konsep tindak tutur ilokusi yang dikembangkan oleh J.L. Austin dan John Searle merupakan pendekatan dalam linguistik pragmatik yang mempelajari tujuan

atau efek yang dimaksudkan oleh pembicara saat berbicara. Tindak tutur ilokusi membahas jenis-jenis tindakan yang dilakukan oleh pembicara melalui ujarannya, seperti menyatakan, bertanya, memerintah, berjanji, dan sebagainya. Setiap tindak tutur ilokusi memiliki efek komunikatif yang spesifik dan dapat mempengaruhi tindakan atau pemahaman lawan bicara.

Konsep tindak tutur ilokusi dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindakan yang dilakukan oleh Presiden melalui pidatonya. Misalnya, apakah Presiden menyampaikan pernyataan, memberikan instruksi, menyuarakan harapan, atau menegaskan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menerapkan konsep tindak tutur ilokusi, analisis pidato Presiden Joko Widodo dapat mengungkapkan tujuan komunikatif yang terkandung dalam ujaran-ujarannya, serta efek yang diharapkan terhadap pendengar atau masyarakat secara umum.

#### **Analisis Wacana Kritis (Van Dijk)**

Pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk merupakan metode analisis yang digunakan untuk memahami struktur dan makna dalam teks atau wacana tertulis maupun lisan. Analisis wacana mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya di mana wacana tersebut dihasilkan, serta fokus pada pemahaman terhadap bagaimana kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial tercermin dalam wacana. Pendekatan analisis wacana kritis dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur, tema, dan makna yang terkandung dalam pidato tersebut. Analisis wacana membantu dalam memahami bagaimana isu antikorupsi disajikan, bagaimana Presiden membangun argumen atau narasi terkait pemberantasan korupsi, serta bagaimana pesan-pesan tersebut dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik yang ada. Dengan menerapkan pendekatan analisis wacana, ini tersebut dapat menggali lebih dalam makna-makna yang terkandung dalam pidato Presiden Joko Widodo, serta menjelaskan hubungan antara tindak tutur ilokusi, implikatur konvensional, dan konteks sosial-politik dalam pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi.

#### **Teori Relevansi (Sperber dan Wilson)**

Teori relevansi yang dikembangkan oleh Dan Sperber dan Deirdre Wilson merupakan teori dalam pragmatik yang menekankan pentingnya relevansi informasi dalam proses komunikasi. Menurut teori ini, komunikasi yang efektif terjadi ketika informasi yang disampaikan oleh pembicara relevan dan bermanfaat bagi pendengar, sehingga memungkinkan tercapainya pemahaman yang optimal. Dalam menganalisis pidato Presiden Joko Widodo di Hari Antikorupsi Sedunia, teori relevansi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pesan-pesan yang disampaikan relevan dengan tujuan komunikatif yang ingin dicapai. Analisis pidato dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apakah informasi yang disampaikan oleh Presiden relevan dengan isu antikorupsi, apakah pesan-pesan tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh pendengar, dan sejauh mana pesan-pesan tersebut dapat memengaruhi pemahaman dan sikap masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Dengan menerapkan teori ini, analisis pidato Presiden Joko Widodo dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pesan-pesan dalam pidato tersebut dapat mencapai tujuan komunikatifnya, serta relevansi informasi yang disampaikan dalam konteks isu antikorupsi yang sedang dibahas

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis implikatur konvensional dan tindak tutur ilokusi dalam pidato Presiden Joko Widodo di Hari Antikorupsi Sedunia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna-makna yang terkandung dalam teks dengan mendalam, serta memahami konteks sosial dan politik di mana pidato tersebut disampaikan. Metode penelitian ini melibatkan analisis tekstual terhadap pidato Presiden Joko Widodo. Analisis tersebut fokus pada identifikasi implikatur konvensional dan tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam kalimat-kalimat pidato, serta pemahaman makna yang tersirat di balik kata-kata yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dari berbagai konsep dalam pragmatik dan analisis wacana, termasuk teori implikatur konvensional (Grice), tindak tutur ilokusi (Austin dan Searle), analisis wacana (van Dijk), dan teori relevansi (Sperber dan Wilson). Pendekatan ini membantu dalam mengembangkan kerangka kerja untuk menganalisis data dan menginterpretasikan makna dalam pidato.

## PEMBAHASAN

### a) Implikatur Konvensional

#### Data 1

*“Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan.”*

Profesionalisme menurut kamus KBBI sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Kalimat di atas mengandung implikatur konvensional bahwa aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana, menunjukkan bahwa profesionalitas dan integritas aparat hukum merupakan faktor kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Sebagai aparatur negara yang bertindak harus bersifat pengayomi serta pelindung masyarakat. Tidak melihat status sosial dalam menegakan keadilan serta tidak tebang pilih dalam proses menentukan keputusan dalam proses keadilan.

#### Data 2

*“Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa.”*

Kalimat tersebut mengandung implikatur konvensional bahwa untuk berhasil dalam pemberantasan korupsi, diperlukan ketekunan, kegigihan, dan konsistensi yang tinggi. Implikatur ini menekankan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi yang tidak akan terwujud secara instan, melainkan memerlukan usaha yang berkelanjutan dan konsisten.

Pemberantasan merupakan kata proses, cara atau perbuatan memberantas tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam hal ini upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang tidak mudah. Harus dilakukan dengan ketekunan, kegigihan serta konsisten yang maksimal.

Menurut kamus KBBI kata pemberantasan, asal kata dari berantas atau memberantas yang berarti membasmi atau memusnahkan. Berdasarkan data di atas pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang tidak mudah diperlukan kegigihan, ketekunan dan konsisten yang dilakukan dengan maksimal oleh semua pihak.

**Data 3**

*“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi.”*

Kalimat tersebut mengandung implikatur konvensional bahwa penilaian terhadap kinerja penegakan hukum tidak hanya berdasarkan jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi lebih pada upaya pencegahan yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Implikatur ini menekankan pentingnya pendekatan preventif dan proaktif dalam penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan). Kinerja penegak hukum yang dimaksud yakni bagaimana kemampuan aparaturnegara dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi. Upaya apa yang dilakukan agar tindak pidana tersebut tidak berulang kembali serta tidak terjadi peningkatan dalam kasus tersebut. Dalam hal ini pihak-pihak tertentu harus berkerjasama agar tindak pidana tersebut tidak berulang kembali serta diberi sanksi yang tegas bila hal tersebut terjadi.

**Data 4**

*“Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup ruang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi.”*

Kalimat tersebut mengandung implikatur konvensional bahwa untuk efektif dalam memerangi korupsi, diperlukan inovasi dalam pendekatan dan sistem, serta tindakan hukum yang adil dan konsisten terhadap pelaku korupsi. Implikatur ini menekankan pentingnya adanya upaya inovatif dan sistematis dalam pencegahan korupsi, sekaligus perlunya penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

**Data 5**

*“Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan.”*

Kalimat ini mengandung implikatur konvensional bahwa dengan langkah-langkah yang terencana dan komprehensif dari tingkat yang paling mendasar hingga yang paling kompleks, diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih besar dalam memberantas korupsi, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju. Implikatur ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam menangani masalah korupsi dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Dari data 5 di atas dapat diungkapkan bahwa dalam proses pemberantasan korupsi di butuhkan langkah-langkah yang sistematis dari jajaran yang tertinggi sampai ke jajaran yang terendah. Diharapkan semua pihak dapat mendukung proses tersebut. Dengan harapan Indonesia kedepan akan lebih baik dari yang saat.

**b) Tindak Tutur Ilokusi****1. Representatif**

Tindak tutur ini digunakan untuk menyatakan fakta, informasi, atau keadaan yang dianggap benar oleh pembicara. Tindak tutur representatif adalah jenis tindak tutur di mana penutur menyatakan sesuatu yang dipercaya sebagai benar atau sesuai dengan

kenyataan. Tindak tutur ini berfungsi untuk menggambarkan, menyatakan, menjelaskan, atau melaporkan suatu keadaan atau peristiwa.

Karakteristik:

- a. Komitmen terhadap kebenaran: penutur berkomitmen pada kebenaran proposisi yang dinyatakan. Penutur meyakini bahwa apa yang dikatakan adalah benar dan sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya.
- b. Bentuk kebahasaan Biasanya menggunakan kalimat deklaratif,
- c. Tujuan untuk memberikan informasi atau berbagi pengetahuan. Tindak tutur ini tidak memerlukan tanggapan langsung dari pendengar, meskipun bisa menimbulkan reaksi atau respon dalam bentuk lain.

**Pernyataan suatu fakta:** *“Mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hal yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.”*

Kalimat tersebut bermaksud menyatakan fakta bahwa mengembangkan budaya antikorupsi dan menciptakan kesadaran akan rasa malu terhadap hasil korupsi merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa memperkuat nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam masyarakat dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk melawan korupsi dan menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Data di atas memberikan informasi terkait kebenaran yang terjadi di lapangan. Apabila kita mengedepankan budaya rasa malu untuk melakukan korupsi secara tidak langsung kita telah mencegah tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan kita berada. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari tindak tutur representatif.

**Penegasan:** *“Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja, dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”*

Kalimat tersebut merupakan sebuah penegasan yang menyatakan bahwa penting bagi semua lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyederhanakan proses kerja serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, kalimat tersebut menegaskan pentingnya upaya kontinu dalam meningkatkan integritas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk kepentingan publik yang lebih baik.

#### **Data 6**

*Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi.*

Data di atas merupakan kalimat penegasan yang menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk generasi muda agar mereka paham akan bahaya tindak pidana korupsi bagi negara dan masyarakat. Selain merugikan negara tentu tindakan tersebut sangat berbahaya.

**Kesimpulan:** *“Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.”*

Kalimat tersebut merupakan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa langkah yang krusial dalam meminimalkan potensi tindak korupsi adalah melalui inisiatif pemerintah dalam merombak sistem perizinan dan layanan publik. Dengan melakukan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan layanan publik, diharapkan bahwa akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi. Dengan demikian, kesimpulan tersebut menegaskan hubungan antara reformasi struktural dengan pencegahan korupsi dalam konteks pelayanan publik.

**Pendeskripsian:** *“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas, mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital.”*

Kalimat tersebut merupakan sebuah pendeskripsi yang menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Pemerintah berusaha untuk mengurangi regulasi yang tumpang tindih, menyederhanakan prosedur yang rumit, serta merampingkan mekanisme dan prosedur birokrasi. Langkah-langkah ini diambil dengan dukungan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, pendeskripsi tersebut menggambarkan usaha konkret pemerintah dalam melakukan perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik.

## 2. Direktif

Tindak tutur ini digunakan untuk memberikan instruksi, permintaan, atau ajakan kepada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur direktif adalah jenis tindak tutur yang bertujuan untuk membuat pendengar melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh penutur. Dalam tindak tutur ini, penutur mencoba mempengaruhi atau mengarahkan perilaku pendengar.

- Tujuan: Memotivasi atau mendorong pendengar untuk melakukan suatu tindakan.
- Bentuk Kebahasaan: Bisa berupa perintah, permintaan, ajakan, saran, atau nasehat. Contoh bentuk kebahasaan:
- Tingkat Kekuatan: Tindak tutur direktif dapat bervariasi dalam tingkat kekuatannya, dari yang sangat kuat (perintah) hingga yang lemah (saran).

**Perintah:** *“Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja, dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”*

Kalimat di atas merupakan sebuah perintah yang menegaskan bahwa semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, menyederhanakan proses kerja, dan pelayanan kepada masyarakat. Perintah ini diberikan dengan tujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian, perintah ini menegaskan pentingnya upaya kontinu dalam meningkatkan integritas, efisiensi, dan kualitas layanan publik sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan dalam melayani kepentingan publik dengan baik.

**Pemesanan:** *“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran.”*



Kalimat tersebut merupakan sebuah pemesanan yang menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Pemesanan ini mengandung makna bahwa pemerintah memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melakukan perubahan besar dalam struktur dan sistem pemerintahan. Tujuan dari pemesanan ini adalah untuk menegaskan pentingnya reformasi struktural sebagai langkah yang diperlukan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, pemesanan ini mengajak untuk memberikan dukungan dan komitmen dalam melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan untuk perbaikan sistem pemerintahan.

**Pemberian saran:** *“Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan, namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.”*

Kalimat tersebut merupakan pemberian saran yang menekankan pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penindakan dan pencegahan tindak pidana, terutama korupsi. Saran ini menyoroti bahwa meskipun profesionalitas aparat penegak hukum memiliki peran sentral, namun perlu adanya perbaikan dalam tata kelola dan pencegahan korupsi. Saran tersebut mengajukan bahwa orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum perlu diarahkan untuk meningkatkan tata kelola yang baik dan efektif dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, pemberian saran ini menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum guna memperkuat integritas dan efektivitas aparat penegak hukum dalam melawan korupsi.

### 3. Komisif

Tindak tutur ini digunakan untuk menyatakan niat, janji, atau komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tindak tutur komisif adalah jenis tindak tutur di mana penutur berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan di masa depan. Penutur menggunakan tindak tutur ini untuk mengungkapkan niat, janji, atau ancaman kepada pendengar.

#### Karakteristik:

- Komitmen terhadap tindakan: penutur mengikat dirinya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Ini menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab penutur terhadap tindakan yang dijanjikan.
- Bentuk kebahasaan: tindak tutur komisif sering diekspresikan melalui janji, sumpah, ancaman, atau tawaran. Contoh bentuk kebahasaan:
- Tujuan: untuk meyakinkan pendengar bahwa penutur akan melaksanakan tindakan yang telah disebutkan, baik itu positif (janji, tawaran) maupun negatif (ancaman).

**Janji:** *“Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan.”*

Janji dalam kalimat tersebut tersebut mencakup upaya untuk lebih efektif dalam memberantas korupsi, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta menjadikan Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan cita-cita bersama. Dengan menyatakan harapan ini, pembicara berkomitmen untuk bekerja secara sistematis dan

menyeluruh untuk mencapai perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Janji ini menunjukkan tekad dan harapan yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diungkapkan dalam kalimat tersebut.

**Ikrar:** *“Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam.”*

Kalimat tersebut merupakan sebuah ikrar yang menegaskan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi meskipun menghadapi tantangan atau hambatan. Dalam konteks kalimat tersebut, meskipun terjadi gangguan seperti padamnya listrik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun semangat dan tekad untuk terus melawan korupsi tidak boleh padam. Ikrar ini menunjukkan keyakinan yang teguh dan keputusan untuk tetap fokus dan berkomitmen dalam upaya memerangi korupsi, meskipun menghadapi rintangan atau kesulitan. Dengan demikian, kalimat tersebut menggambarkan semangat pantang menyerah dan keinginan yang kuat untuk terus melanjutkan perjuangan melawan korupsi.

#### 4. Deklarasi

Tindak tutur deklaratif merupakan jenis tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan keputusan, penetapan, atau perubahan status atau keadaan sesuatu. Dalam tindak tutur deklaratif, pembicara menggunakan ucapannya untuk menciptakan suatu realitas baru atau mengubah realitas yang ada. Tindak tutur deklaratif adalah jenis tindak tutur yang menghasilkan perubahan langsung dalam status atau situasi dunia nyata melalui ucapan yang dilakukan oleh penutur. Penutur memiliki kekuatan atau otoritas tertentu yang memungkinkan perubahan tersebut terjadi.

##### **Karakteristik:**

- **Kekuatan Performatif:** Ucapan deklaratif bersifat performatif, artinya tindakan itu terjadi secara langsung pada saat ucapan diucapkan.
- **Otoritas Penutur:** Penutur harus memiliki otoritas atau kekuatan yang sah untuk melakukan tindak tutur deklaratif, seperti hakim, presiden, atau tokoh agama.
- **Konteks Sosial:** Tindak tutur ini sering terjadi dalam konteks formal atau institusional, seperti upacara pernikahan, pengadilan, atau organisasi resmi.
- **Bentuk Kebahasaan:** biasanya menggunakan kalimat deklaratif

##### **Data 7**

*“Pemerintah akan meluncurkan program pelatihan anti-korupsi untuk seluruh pegawai pemerintah.”*

Kalimat ini merupakan tindak tutur deklaratif karena menyatakan niat atau keputusan pemerintah untuk meluncurkan program pelatihan anti-korupsi untuk seluruh pegawai pemerintah. Kalimat tersebut menggambarkan suatu tindakan yang akan dilakukan di masa depan sebagai hasil dari keputusan atau niat yang dinyatakan.

##### **Data 8**

*“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran regulasi yang timpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas”*

Kalimat ini merupakan tindak tutur deklaratif karena menyatakan niat atau keputusan pemerintah untuk memberantas sistem yang timpang tindih serta rumit yang selama ini masih terjadi di lapangan. Kalimat tersebut mengandung unsur

kekuasaan karena yang menuturkan kalimat tersebut orang yang memiliki kekuatan performatif

## PENUTUP

Dalam penelitian ini, implikatur konvensional dan tindak tutur ilokusi menyoroti cara bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan antikorupsi dengan makna tersirat dan pengaruh langsung terhadap pendengar. Implikatur konvensional mengungkapkan makna lebih dari kata-kata, sementara tindak tutur ilokusi memperlihatkan pengaruh pidato terhadap perilaku dan pemahaman audiens. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas penggunaan bahasa dalam mencapai tujuan komunikasi Presiden dalam konteks peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsani, F. 2019. Tindak Tutur Direktif dan Implikatur Konvensional dalam Wacana Meme Dilan. *Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 1-10.
- Agustina, Leonie dan Chaer. 2014. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta
- ATIKAH, A. 2023. *Tindak Tutur Ilokusi dan Implikatur dalam Film Dignitate Sutradara Fajar Nugros (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA)*.
- Brown, Gillian dan George Yule. 1996. *Analisis Wacana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Mokodompit, P. W., Pelealu, H., & Ranuntu, G. C. 2021. ANALISIS TINDAK ILOKUSI DALAM DRAMA RIDERS TO THE SEA KARYA JM SYNGE. *JURNAL ELEKTRONIK FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SAM RATULANGI*, 25.
- Muktadir, A. (2016). Aneka Implikatur Yang Terkandung Dalam Tindak Tutur Novel “Ketika Derita Mengabadikan Cinta”. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 9(3), 340-346.
- Nadar, FX. (2009). *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Risnawati, R., Sugono, D., & Suryana, A. (2022). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dan Implikatur Konvensional dalam Wacana tentang Meme Covid 19. *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 5(2), 212-230.
- Rohmadi, Muhammad. 2004. *Pragmatik Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Lingkae Media
- Searle, J. R. (1969). *Speech Art*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://youtu.be/dGDoYvwoZzA?si=LyqrcjLf8qSZ9VU8>